

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 diperbaharui 2021 pada buku (Jessy.2021:209). Teori ini menjelaskan adanya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam suatu perusahaan. Hubungan agensi ini didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau lebih orang, dimana principal mengikat orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan sesuai kepentingan principal yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas untuk membuat keputusan bagi agent.

Jensen dan Meckling menyatakan hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara agent dengan principal. Jika kedua kelompok (agent dan principal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agent tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Jessy.2021:209).

Menurut Jensen dan Meckling, biaya keagenan (*agency cost*) terdiri dari :

- 1. Monitoring expenditures by the principle.**

Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*)

perilaku agen melalui budget restriction, dan compensation policies

2. Bonding expenditures by the agent.

The bonding cost Dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.

3. Residual loss

Merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dari sebuah hubungan keagenan.

Menurut Jatiningrum, (2022:16) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Menurut (Ikhsan, 2022), *agency problem* terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara agent dengan principal. Agent sebagai pihak internal perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan yang sesungguhnya dibandingkan principal (Jatiningrum, 2022:16).

Permasalahan yang timbul disebabkan adanya kesulitan dari pihak pemilik (principal) untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap pihak manajer. Keleluasaan agen dalam pengambilan keputusan memerlukan

pengendalian, sehingga terjadi keseimbangan kondisi biaya termasuk teknologi dan kontrol masalah keagenan. Jensen dan Meckling 1976 mendefinisikan agency cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen (Jatiningrum, 2022:16).

2.1.2 Teori Sinyal

Menurut Brigham & Houston (2020) signalling theory merupakan sebuah teori mengenai alasan perusahaan memberikan informasi keuangan ke pasar modal. Teori sinyal menjelaskan bahwa manajemen perusahaan bertindak sebagai agen yang harus mengkomunikasikan informasi pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Di dalam signalling theory dijelaskan bahwa teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bahwa keputusan investasi juga dipengaruhi oleh naik turunnya harga saham di pasar. Menurut signalling theory, perusahaan dikatakan berkualitas apabila memberikan sinyal kepada pasar. Sinyal yang diberikan kepada pasar bertujuan untuk mendapatkan pandangan terhadap imbalan yang akan diperoleh atas kualitas sebuah perusahaan (Jogiyanto, 2020:227).

Teori sinyal juga menekankan bahwa perusahaan akan mengirimkan informasi kepada pihak eksternal perusahaan (para investor atau pemangku kepentingan lain). Informasi yang disampaikan oleh perusahaan akan menggambarkan prospeknya di masa depan dimana biasanya perusahaan akan berusaha untuk menunjukkan prospek yang lebih baik dibanding perusahaan lain. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, segala

informasi yang disampaikan oleh perusahaan menjadi unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan (Madan & Wang, 2024:2).

2.1.3 Persistensi Laba

Persistensi laba adalah salah satu indikator untuk mengetahui kualitas laba perusahaan. Menurut Fanani (2020), persistensi laba menjadi pusat perhatian bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharapkan persistensi laba yang tinggi. Jika laba yang diperoleh pada tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba di masa depan, maka laba tersebut dikatakan laba yang persisten. Laba yang tidak terlalu berfluktuatif adalah ciri-ciri dari laba yang persistensi dan kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan adalah baik (Restrepo Klinge, 2021).

Menurut Penman (2019) mendefinisikan persistensi laba sebagai revisi laba yang disebabkan oleh inovasi laba di tahun berjalan dengan merevisi laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang, dalam menentukan persistensi laba dapat dilihat dari komponen akrual dan aliran kas yang terdapat dalam laba saat ini. Sisi lain Persada & Martani (2020) berpendapat bahwa persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan pada masa mendatang tercermin dari laba tahun berjalan yang ditentukan dengan komponen akrual dan aliran kas yang terdapat dalam laba saat ini. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa persistensi laba merupakan salah satu indikator untuk memprediksi laba di masa mendatang dengan menggunakan laba tahun berjalan sebagai acuan (Rini Tri Hastuti, 2021).

Persistensi laba memfokuskan pada koefisien dari regresi laba sekarang terhadap laba mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien slope regresi antara laba sekarang dengan laba mendatang. Semakin tinggi (mendekati angka 1) koefisiennya menunjukkan persistensi laba yang dihasilkan tinggi, sebaliknya jika nilai koefisien mendekati nol, persistensi labanya rendah atau laba transitorinya tinggi. Jika nilai koefisiennya bernilai negatif, pengertiannya terbalik, yaitu nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan kurang persisten, dan nilai koefisien yang lebih rendah menunjukkan lebih persisten (Fella & Sair, 2021).

2.1.4 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memiliki beberapa variabel pengukuran diantaranya adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah saham kepemilikan oleh sebuah Lembaga institusional atau investor institusional yang digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. *Agency conflict* merupakan perilaku oportunistik yang dilakukan pihak manajemen di dalam perusahaan yang merugikan yang menyebabkan perusahaan tidak maksimal dalam mencapai target tujuan laba. Tingkat kepemilikan saham oleh lembaga institusional yang tinggi maka menimbulkan usaha melakukan pengawasan yang lebih besar sehingga diharapkan dapat mengurangi *agency conflict* yang terjadi (Kartika 2021:43).

Agency conflict bukan satu-satunya masalah yang dapat menghambat tujuan perusahaan mencapai tujuannya karena setelah banyak pihak turut andil melakukan pengawasan maka muncul *agency cost* yaitu

pengeluaran biaya tambahan lebih sebagai efek melakukan Kerjasama. Untuk mengurangi *agency cost* maka harus menghadirkan unsur kepemilikan manajerial yaitu salah satu cara meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Semakin banyak pihak manajer yang memiliki tujuan kepentingan yang sama dan hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan membentuk laba yang persisten. Ketika kepemilikan manajerial telah terpenuhi untuk menyelaraskan antara kepentingan pihak manajer dan pihak pemegang saham maka perlu dilakukan sebuah proses pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris independen. Menyatakan bahwa kualitas laba perusahaan akan membentuk persistensi laba ketika terjadi peningkatan ke jumlah anggota dewan komisaris independen (Kartika 2021:43).

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis tersebut merupakan dampak buruknya penerapan praktik *good corporate governance* (Kartika 2021:107).

Penerapan *good corporate governance* juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada lima prinsip utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan. Kelima prinsip *good corporate governance* ini penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan. Konsep *good corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Nursita, M. 2021:71).

Berdasarkan beberapa definisi *good corporate governance*, menyimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Nursita, M. 2021:75).

Esensi dari *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya,

berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Nursita, M. 2021:82).

Prinsip-prinsip di atas diterjemahkan ke dalam enam aspek yang dijabarkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan regulatori untuk *good corporate governance* di suatu negara (Nursita, M. 2021:84).

Keenam aspek tersebut adalah:

- 1) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *good corporate governance*: Kerangka kerja *good corporate governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung jawab di antara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.
- 2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
- 3) Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham: seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.
- 4) Peran stakeholders dalam *good corporate governance*: hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dan kontrak kerja sama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan aset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.

- 5) Disklosur dan transparansi: disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek materiil perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.
- 6) Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (*Corporate Boards*): pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham (Manossoh, 2024:22).

Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola dengan baik Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
3. Dewan Komisaris atau
4. Dewan Pengawas Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi
6. Aspek lainnya (BEI (Bursa Efek Indonesia), 2020)

Karena perusahaan memiliki banyak sub kepentingan dan fungsi yang berbeda-beda di dalamnya sehingga fungsi dewan komisaris menjalankan pengawasan secara menyeluruh tidak cukup maka dari itu perlu dibantu oleh komite audit. Komite audit memiliki fungsi yang hampir sama dengan dewan komisaris yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen atas proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan meningkatkan laba yang persisten. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba (Hendariningrum & Susilo, 2020).

Dalam penelitian ini, pengukuran tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang digunakan adalah ukuran jumlah Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan komite audit.

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial

Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kepemilikan Manajerial adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Kepemilikan Manajerial atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan Kepemilikan Manajerial yang berasal dari luar atau perusahaan publik Lebih lanjut terdapat persyaratan wajib sebagai komisaris independen yaitu bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan anggota Kepemilikan manajerial, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan tersebut, serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung (Kartika Mayang, 2020).

Setiap perusahaan tercatat wajib memiliki manajerial paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota kepemilikan manajerial dengan salah satu diantaranya adalah manajerial independen. Dalam hal kepemilikan manajerial terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Kepemilikan Manajerial, jumlah kepemilikan manajerial wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota kepemilikan manajerial (Fitria, 2023).

Jumlah kepemilikan manajerial harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

2. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh

dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam Komite Audit (*audit committee charter*) paling kurang memuat :

- a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
- b. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
- c. Tata cara dan prosedur kerja
- d. Kebijakan penyelenggaraan rapat
- e. Sistem pelaporan kegiatan
- f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
- g. Masa tugas komite audit.

Berdasarkan peraturan tersebut, juga dijelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen serta diwajibkan salah seorang dari anggota komite audit tersebut memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan (Aditya, 2023).

Beberapa tugas komite audit diantaranya melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain

laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya. Komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan publik (Nelvirita dan Delvira, 2023:67).

2.1.5 Arus Kas Operasi

Analisis laporan arus kas sangat penting karena menggunakan akuntansi basis kas dari pada akuntansi basis akrual. Penting untuk dipahami, karena organisasi dapat memperoleh pendapatan akuntansi tetapi mungkin tidak benar-benar menerima uang tunai. Analisis laporan arus kas yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat membantu mengidentifikasi dana tidak produktif yang digunakan, serta untuk memastikan dan merencanakan arus kas masa depan. Indikator kepastian, jumlah dan waktu arus kas masa depan dapat diperoleh dari penggunaan informasi arus kas masa lalu. Hal ini juga berguna untuk menguji keakuratan arus kas masa lalu untuk arus kas masa depan dan memeriksa hubungan arus kas dengan profitabilitas dan perubahan harga (Dewi 2020:47).

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan

arus kas keluar dari setiap aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan pada bagian paling atas laporan arus kas. Bagian ini menunjukkan berapa banyak kas yang masuk dan keluar dari kegiatan utama organisasi tersebut, serta memberikan gambaran terbaik tentang seberapa baik aktivitas operasi dalam menghasilkan uang tunai. Idealnya, suatu organisasi harus memberikan nilai positif dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan yang disajikan pada laporan arus kas tidak secara langsung berkaitan dengan produksi barang dan penyediaan jasa (Syofriyeni, 2024:176).

Arus kas dari kedua aktivitas tersebut menyajikan informasi bagaimana suatu organisasi tumbuh dalam jangka panjang dan bagaimana pembiayaannya. Keduanya sangat penting dalam mempertahankan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Informasi arus kas dari aktivitas operasi penting karena:

1. Memberikan seberapa berhasil suatu organisasi menghasilkan uang dari aktivitas utamanya. Bagian ini secara tidak langsung mencerminkan keunggulan kompetitif dan efisiensi operasional organisasi.
2. Arus kas operasi menyajikan informasi seberapa baik organisasi mengkonversi laba menjadi uang tunai. Memanipulasi arus kas operasi lebih sulit dibandingkan dengan laba bersih organisasi.
3. Arus kas operasi yang positif berarti organisasi memiliki sisa uang

untuk pengeluaran non-operasional. Misalnya untuk digunakan melunasi utang atau membiayai ekspansi di masa depan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (Syofriyeni, 2024:176).

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan, sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi (Wulaningrum, 2022:1).

Arus kas operasi dalam suatu perusahaan didapatkan dari hasil aktivitas pendapatan perusahaan (*principal revenue activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Selain itu, arus kas operasi juga berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, serta merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa

mengandalkan sumber pendanaan dari luar (Nursita, 2021).

Arus Kas Operasi (*Operating cash flow*) menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jadi arus kas aktivitas operasi dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi perusahaan. Semakin tinggi arus kas operasi menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik dan diprediksi akan menghasilkan laba yang lebih baik pada periode berikutnya.

Ini akan menarik para investor untuk berinvestasi dan akan mengakibatkan perusahaan lebih konservatif ketika arus kas operasi yang dihasilkan tinggi (Halim, 2021).

2.1.6 Tingkat Hutang

Tingkat Hutang (*leverage*) merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yaitu beban bunga, beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman dari pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak (Marfuah, 2021). Sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap penghindaran pajak oleh suatu perusahaan (Ahsanuamala, 2020).

Tingkat hutang berupaya untuk memperoleh laba tidak terlepas dari sumber modal perusahaan untuk mengembangkan usaha demi

menghasilkan laba yang maksimal. Salah satu sumber modal eksternal perusahaan adalah berupa pinjaman atau utang. Selain itu, utang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan lebih kecil. Penghematan tersebut dapat menjadi laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar tingkat hutang adalah besarnya tingkat penggunaan utang dalam perusahaan (Aprilia Maharani Firdousy et al., 2021).

Menurut Amstrong dalam leverage biasanya diukur dengan *debt to asset ratio* (DAR) yaitu rasio yang membandingkan antara total kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan dengan total aset yang dimiliki sebuah perusahaan (Firdousy et al., 2021).

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang at dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya maka mencerminkan semakin besar ukuran suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan dengan lebih banyak aset likuid diduga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan. Ukuran perusahaan diekspektasikan berpengaruh terhadap kualitas audit yang diukur dengan proksi opini audit going concern (Nindita dan Siregar, 2021).

Semakin besarnya ukuran perusahaan maka kebutuhan akan dana juga

akan semakin besar yang salah satunya dapat berasal dari pendanaan eksternal yaitu hutang. Perusahaan besar memiliki keuntungan aktivitas serta lebih dikena oleh publik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga kebutuhan hutang perusahaan yang besar akan lebih tinggi dari perusahaan kecil. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan semakin transparan dalam mengungkapkan kinerja perusahaan kepada pihak luar, dengan demikian perusahaan semakin mudah mendapatkan pinjaman karena semakin dipercaya oleh kreditur . Penelitian yang dilakukan Homaifar dan Zietz et.al (1994) dalam Buku (Erry Setiawan, 2022:71), menunjukkan hasil yang seragam dimana ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat hutang perusahaan (Erry Setiawan, 2022:71).

Perusahaan yang lebih besar memiliki kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih berpengalaman dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam kegiatan operasinya dibandingkan perusahaan kecil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu alat pendukung dari sebuah penelitian yang memberikan informasi mengenai apa yang diteliti serta mampu mendukung teori serta mampu mendukung konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini,

Berikut disajikan rincian mengenai penelitian terdahulu mampu

mendukung data atau informasi yang digunakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian maulita, Dien sefty framitha, herman wijaya, dan burhanudin (2023)	Implikasi <i>good corporate governance</i> terhadap persistensi laba	Penelitian budiman & helena, (2017), Wahyudianti, (2021) Kurniawati (2019) dan sujana et al (2017) dimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persistensi laba
2.	Yuni maya sari dan mayar afriyenti (2021)	Pengaruh tata kelola perusahaan dan volatilitas arus kas terhadap persistensi laba (studi empiris pada perusahaan	Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap prsistensi laba diantaranya penelitian khafid (2012) dan Kusuma dan sadjiarto
		Manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019)	(2014) yang berkesimpulan bahwa komposisi dewan komisaris independen dalam perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap persistensi laba diantaranya penelitian dari khafid (2012), memberikan kesimpulan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba.

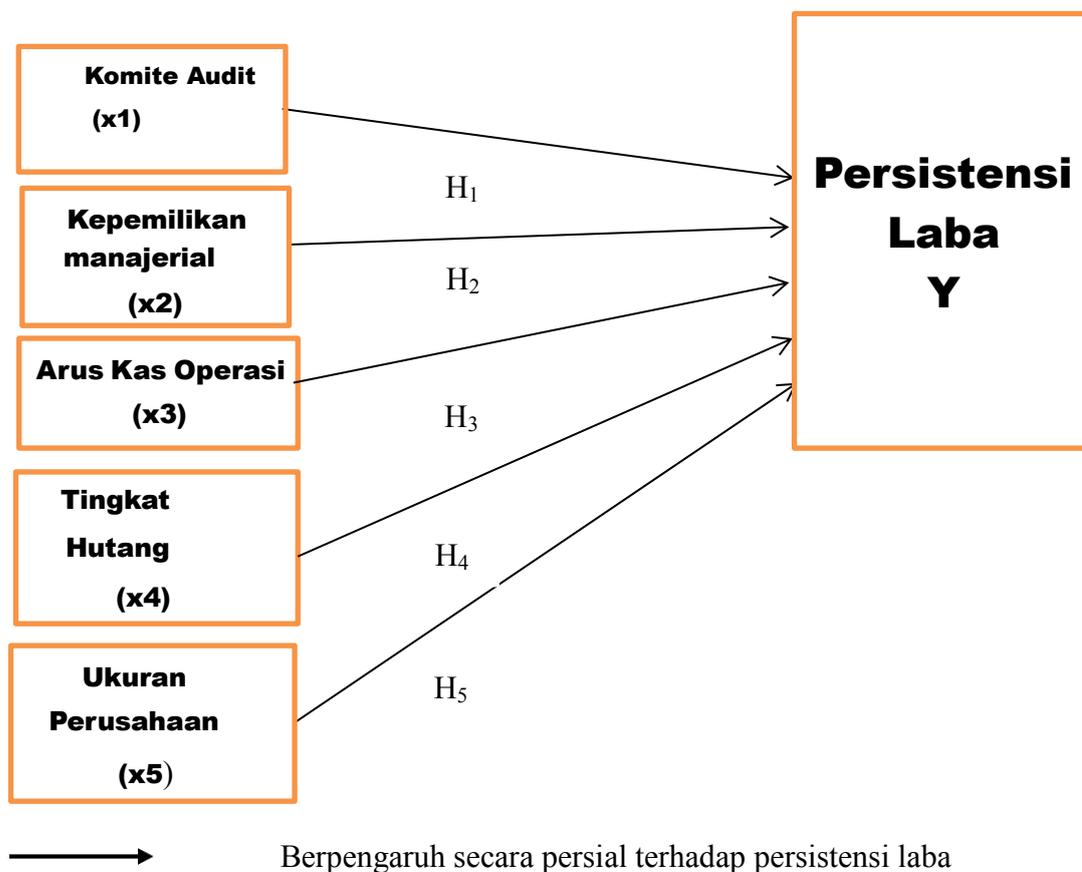
3.	Rinny meidiyustiani dan retno fuji oktaviani (2021)	Pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Arus kas operasi merupakan kumpulan aliran kas yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan Yaitu berupa kas dari penjualan barang atau jasa dan menerima pengambilan Piutang.
4.	Muhamad robi Salam dan muhammad nuryatno amin (2024)	Peran kepemilikan manajerial memoderasi tingkat Hutang, ukuran perusahaan, arus kas operasi terhadap persistensi laba	Tingkat hutang memberi pengaruh positif pada persistensi laba. Sebagaimana pada teori sinyal bahwa informasi dari perusahaan menjadi sinyal bagi pasar untuk pihak luar, sehingga dengan tingkat hutang yang besar dapat mendorong peningkatan pada perusahaan terkait hasil kerja sehingga dapat melunasi hutang perusahaan, yang mana hal tersebut membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan tingkat persistensi laba pun Mengikuti.
5.	Fransesca yoana, thia margaretha tarigan dan Christianus yudi	Dampak kuantitas Akrua, volatilitas Arus kas operasi, dan tingkat utang terhadap	Tingkat utang berdampak negatif pada persistensi laba karena kekurangan dana Operasional dapat

	Prasetyo (2024)	Persistensi laba	Menyebabkan penurunan persistensi laba. Karena hasil regresi menunjukkan nilai t hitung dengan nilai 4,194 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung lebih besar dibanding t tabel, yaitu sebesar 4,194 $> 1,972$ sehingga model diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat utang, maka perusahaan akan semakin mampu mempertahankan labanya atau semakin tinggi Persistensi laba.
6.	Muhamad robi Salam dan muhammad nuryatno amin (2024)	Peran kepemilikan manajerial memoderasi tingkat Hutang, ukuran perusahaan, arus kas operasi terhadap persistensi laba	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba karena diterima, yang mengartikan ukuran perusahaan memberi pengaruh pada persistensi laba; c) nilai probabilitas dari variabel arus kas operasi yaitu 0,160 yang artinya tidak melebihi 0,05, sehingga arus kas operasi tidak memberi pengaruh pada persistensi laba. Maka Hipotesis ketiga

Sumber :Peneliti 2024

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah dalam pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas terkait dengan hubungan antara variabel independen dan dependen, berikut adalah model dari kerangka konseptual penelitian.



Sumber : Peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat- sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain(Almasdi Syahza, 2021:560).

Tabel 2.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Persistensi laba	Persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang (Sarah et al.,2019 :120).	Persistensi laba = $\frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{saham yang beredar}}$	Rasio
<i>Good Corporate Governance</i>	Diukur dari besar kecilnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang berasal dari jumlah modal saham perusahaan yang dikelolanya Komite audit akan melakukan perbaikan pada tata cara pengawasan manajemen perusahaan, karena hal tersebut akan menjadi perantara dalam perusahaan yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris (Maharani dan Majidah, 2020 :490).	Komite Audit KA = Σ Jumlah Anggota Komite Audit Kepemilikan Manajerial $KM = \frac{\text{jml saham manajer}}{\text{jml saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
Arus Kas Operasi	Mengukur laporan arus kas dan rasio pengeluaran modal (PM) (Amaliyah & Suwarti, 2017: 55).	Rasio AKO = $\frac{\text{Arus kas operasi}}{\text{Lembar saham beredar}}$	Rasio
Tingkat Hutang	Kewajiban atau hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak- pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal suatu perusahaan (Barus dan Rica, 2019: 91).	Tingkat hutang Total Hutang X 100% = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan, biasanya untuk mengukur besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya aset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan (Amaliyah & Suwarti, 2017:24).	Ukuran Perusahaan = Log (Total Aset)	Rasio
-------------------	---	---	-------

2.5 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenarannya. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

2.5.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* Yang Diprosikan Kepemilikan Manajerial Terhadap Persistensi Laba

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Kepemilikan manajerial harus dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2022:78).

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh komisaris/direksi dari saham perusahaan yang beredar. Manajemen tidak hanya berperan sebagai agen namun manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial akan

semakin besar persistensi laba, artinya peningkatan atau penurunan kepemilikan manajerial akan menaikkan atau menurunkan persistensi suatu entitas. Peningkatan kepemilikan manajerial akan membawa respon positif bagi pasar, dan pasar beranggapan bahwa peningkatan proporsi kepemilikan manajerial menyebabkan persistensi laba akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri dan Supadmi, 2020), (Wahyudianti, 2021), (Rachmanto, 2021) dan (Pratomo dan Naraulia, 2021). yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada persistensi laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

Ha.1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap persistensi laba

2.5.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* Yang Diprosikan Komite Audit Terhadap Persistensi Laba

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Komite audit merupakan salah satu organ yang dibentuk dalam rangka upaya menciptakan *good corporate governance* yang diharapkan mempengaruhi persistensi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Komite audit yang merupakan pengelola perusahaan, dapat memodifikasi laporan keuangan. Karena komite audit yang bersentuhan langsung dengan proses

pemeriksaan laporan keuangan serta memiliki posisi yang cukup memegang andil, komite audit juga berpotensi untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Semakin sedikit komite audit, maka kemungkinan untuk menyatukan pendapat untuk memodifikasi laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini berarti, semakin sedikit jumlah komite audit perusahaan, maka semakin kecil persistensi laba perusahaan tersebut. Sebaliknya, bila anggota komite audit dari banyak anggota, maka semakin sulit untuk mencapai kesepakatan untuk memodifikasi laporan keuangan. Hal ini dapat memicu laba perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan memiliki persistensi yang baik (Kurniawati,2020). Berdasarkan uraian diatas dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maulita *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap persistensi laba.

Ha 2: Komite Audit berpengaruh terhadap Persistensi Laba.

2.5.3. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia 2015, 2:3) dalam buku (Erry Setiawan, 2022:105) arus kas aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Arus kas pada umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba rugi. Arus kas operasi juga dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan persistensi laba, sehingga aliran kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba, arus kas operasi merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya persistensi laba perusahaan. Semakin tinggi arus kas operasi sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat persistensi labanya. Informasi arus kas operasi perusahaan dapat dijadikan alat pengecekan atas informasi laba dan sebagai pengukur kinerja perusahaan (Erry Setiawan, 2022:105).

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ni Putu Lestari Dewi (2024) yang dapat menunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Semakin tinggi nilai arus kas operasi suatu perusahaan maka persistensi laba akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Ha 3 : Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba.

2.5.4. Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Persistensi Laba

Hutang dapat mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Sehingga perusahaan akan meningkatkan persistensi labanya dengan tujuan agar dapat mempertahankan kinerjanya serta melunasi hutangnya. Kinerja yang baik di harapkan oleh kreditur, agar kepercayaan kepada perusahaan dalam meminjamkan dana (Gunawan dan Fakhroni, 2022) (Exan dan Galang Stone, 2022).

Ha 4 : Tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba.

2.5.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba

Ukuran perusahaan adalah suatu indikator dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik perusahaan dimana terdapat parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran besar kecilnya perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan, total penjualan perusahaan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode dan jumlah aktiva yang dimiliki (Awaliyah dan Siwati, 2021) (Firdousy et al., 2022).

Faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan, besar atau kecilnya usaha tersebut di lihat dari lapangan usaha yang dijalankan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki berbagai macam kelebihan dibanding perusahaan berukuran kecil. Salah satunya dalam biaya, perusahaan ukuran besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nuraini, 2024), menemukan bahwa “Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Persistensi laba”.

H5 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba.